

DINAMIKA KONDISI SOSIAL DI INDONESIA: ANALISIS RESPONS TERHADAP REFORMASI PERATURAN EKONOMI-POLITIK PEMERINTAH

Ahmad Kifli Syafei ¹, Chantika Rachmadina Hakim ², Kurniawan ³, Ngatimin ⁴

sahmadkifli@gmail.com ¹ aufaza.chantika@gmail.com ² wawankabuki@gmail.com ³
ngatimin77@gmail.com ⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akuntansiperpajakan@unpam.ac.id, Universitas Pamulang

ABSTRACT

This small study examines how social conditions in Indonesia have changed in response to economic and political policy changes implemented by the government, particularly since the reforms of 2020 to the present. This study uses data from sources such as the Central Statistics Agency (BPS), the World Bank, and the latest socio-economic reports to analyze the impact of policies such as economic deregulation, property rights, and political system changes on various social aspects such as income inequality, unemployment rates, access to education, and social stability. The results show that although these reforms have promoted economic growth, they have also exacerbated social inequality, as evidenced by increased protests and political divisions. The conclusion emphasizes the need for policies that include all parties to reduce the risk of social conflict, with a recommendation to use real-time data so that it can be monitored continuously. This research helps to understand the social and political dynamics in Indonesia in the era of globalization.

(Keywords: economic and political reform, social conditions in Indonesia, public response, social inequality)

ABSTRAK

Penelitian kecil ini melihat bagaimana kondisi sosial di Indonesia berubah sebagai tanggapan terhadap perubahan aturan ekonomi dan politik yang diterapkan pemerintah, terutama setelah reformasi pada tahun 2020 hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan data dari sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia, dan laporan sosial-ekonomi terbaru untuk menganalisis dampak kebijakan seperti pengurangan regulasi ekonomi, pemberian hak atas properti, dan perubahan sistem politik terhadap berbagai aspek sosial seperti perbedaan pendapatan, tingkat pengangguran, akses pendidikan, serta kestabilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial, terlihat dari meningkatnya protes dan perpecahan politik. Kesimpulan menekankan perlunya kebijakan yang mencakup semua pihak untuk mengurangi risiko konflik sosial, dengan saran untuk menggunakan data secara real-time agar bisa diawasi terus-menerus. Penelitian ini membantu memahami dinamika sosial dan politik di Indonesia di masa globalisasi.

(Kata kunci: reformasi ekonomi dan politik, kondisi sosial Indonesia, tanggapan masyarakat, ketimpangan sosial)

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1188

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar di wilayah Asia Tenggara, telah melakukan berbagai perubahan dalam aturan politik dan ekonomi sejak masa reformasi tahun 1998. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing di tingkat internasional, menarik investasi dari luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil bagi semua. Salah satu langkah penting adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang menyederhanakan dan menggabungkan lebih dari 70 undang-undang terkait investasi, pekerja, lingkungan, dan proses izin. UU ini bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mudah, memangkas prosedur birokrasi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan harapan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Namun, pelaksanaan reformasi ini juga menimbulkan perdebatan. Berbagai pihak, seperti serikat buruh, aktivis sosial, dan akademisi, menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi. Misalnya, ketentuan darurat dalam UU Cipta Kerja bisa melemahkan perlindungan bagi para pekerja, meningkatkan jumlah pengangguran, dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, pendukung perubahan ini berpendapat bahwa liberalisasi ekonomi akan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan akhirnya memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Situasi ini menghasilkan respons sosial yang beragam, mulai dari aksi protes besar hingga peningkatan pertumbuhan investasi dalam negeri.

Masalah utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah kurangnya analisis yang mendalam mengenai bagaimana perubahan peraturan politik dan ekonomi secara langsung memengaruhi kondisi sosial seperti tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi per orang. Meski terdapat peningkatan investasi asing setelah tahun 2020, ada kekhawatiran bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak merata, sampai akhirnya memperlebar ketimpangan antara masyarakat menengah dan kelompok yang rentan. Hal ini relevan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, karena kebijakan ekonomi dan politik harus seimbang dengan aspek sosial agar bisa menghindari konflik dan ketidakstabilan.

Tujuan dari riset ini adalah menganalisis bagaimana kondisi sosial di Indonesia bergeser seiring berlangsungnya reformasi kebijakan politik dan ekonomi pemerintah, terutama sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja diberlakukan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengukur perubahan indikator sosial melalui data kuantitatif, mengidentifikasi pola respons masyarakat yang positif atau negatif, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi dampak sosial yang muncul. Manfaat dari penelitian ini mencakup kontribusi bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Bagi pemerintah, hasil riset dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Bagi akademisi, kajian ini menambah pengetahuan tentang dampak reformasi di negara berkembang. Sementara itu, bagi masyarakat, riset ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

1. KERANGKA TEORI

1.1 Teori Modernisasi

Teori modernisasi mengatakan bahwa negara berkembang bisa tumbuh secara ekonomi dengan melakukan perubahan seperti meliberalisasi pasar, mengurangi peraturan pemerintah, dan mendorong investasi dari luar negeri. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, perubahan aturan ekonomi dan politik seperti Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai langkah awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini, investasi asing dan efisiensi dalam bisnis diharapkan bisa meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi jumlah orang miskin. Namun, teori ini menganggap bahwa manfaat ekonomi akan terasa oleh semua lapisan masyarakat. Sayangnya, di dalam kenyataannya, dampaknya bisa tidak sama untuk semua orang (Rostow, 1960).

1.2 Teori Dependensi

Teori dependensi mengatakan bahwa perubahan ekonomi dan politik yang didorong oleh kekuatan besar di luar negeri, seperti neoliberalisme, bisa membuat negara-negara berkembang semakin bergantung pada pasar internasional. Hal ini justru bisa memperparah ketimpangan antar masyarakat. Menurut Hadiz (2022:9) “yang paling dirugikan dari proses ini adalah kaum miskin perkotaan dan pedesaan, serta kelompok terpinggirkan seperti minoritas etnis dan agama, dan masyarakat adat”. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan masuknya investasi asing mungkin membuat perusahaan besar dari luar negeri semakin kuat, sehingga mengurangi peluang usaha kecil lokal. Akibatnya, banyak pekerja di sektor lokal kehilangan pekerjaan, dan mereka yang bekerja secara informal justru semakin miskin. Teori ini juga bisa menjelaskan mengapa masyarakat merasa tidak puas dengan perubahan ekonomi, karena meskipun ekonomi tumbuh, rasa adil dan kesejahteraan bagi semua tidak tercapai (Frank, 1967).

1.3 Teori Respons Kebijakan Ekonomi-Politik

Teori ini menjelaskan bahwa cara masyarakat merespons perubahan di bidang ekonomi dan politik bergantung pada bagaimana kebijakan itu dibuat dan diterapkan. Jika reformasi dilakukan dengan baik, maka masyarakat akan berpikiran positif, seperti penurunan jumlah orang miskin karena adanya pekerjaan baru. Namun, jika reformasi tidak berjalan baik, bisa terjadi respons negatif, misalnya meningkatnya pengangguran dan terjadinya ketidakstabilan sosial. Para pekerja maupun buruh di Indonesia terus menerus menghadapi masalah seputar persoalan kesejahteraan (Sitti, dkk., 2025). Dalam studi berbasis data, teori ini digunakan untuk melihat hubungan antara berbagai indikator reformasi, seperti peningkatan investasi dari luar negeri, dengan berbagai kondisi sosial seperti tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan pendapatan per kapita. Hipotesisnya adalah bahwa cara masyarakat merespons akan berbeda tergantung pada kondisi dan situasi di setiap daerah di Indonesia (Easterly, 2001).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan memanfaatkan data sekunder dari sumber yang resmi. Variabel independen adalah reformasi peraturan ekonomi-politik, yang diukur melalui beberapa indikator, seperti jumlah investasi

asing dan perubahan regulasi terkait tenaga kerja setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja tahun 2020. Variabel dependen adalah kondisi sosial, yang mencakup tingkat kemiskinan (dinyatakan dalam persentase penduduk yang miskin), tingkat pengangguran (dinyatakan dalam persentase angkatan kerja), serta PDB per kapita (dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat).

Metode pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik ini dipilih karena menekankan pada pengukuran indikator sosial dengan angka-angka, seperti persentase orang miskin dan pengangguran.

Data tersebut dianalisis secara statistik untuk mengetahui pola respons terhadap reformasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan tren data, sedangkan pendekatan analitik digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat melalui teknik regresi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan informasi berdasarkan fakta, bukan berdasarkan penafsiran pribadi.

Metode ini juga dipilih antara lain karena data sekunder utama yang diambil adalah data dari sumber resmi, dapat dicari dan diambil secara gratis, sehingga mengurangi risiko bias hasil survei. Metode ini juga lebih cepat dan hemat biaya untuk penelitian kecil, karena tidak perlu mengumpulkan data dari awal yang memakan banyak biaya dan waktu.

2.2 Ruang Lingkup dan Periode Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam mini riset ini ditentukan secara spesifik agar fokus dan analisis tetap jelas serta mendalam, tanpa merumitkan hal yang tidak perlu. Penelitian ini mencakup beberapa aspek tertentu, dengan alasan agar tetap relevan dan layak dalam konteks mini riset ini.

- 1) Fokus pada perubahan kondisi sosial di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan aturan ekonomi-politik pemerintah, terutama Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Variabel sosial yang dianalisis meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan PDB per kapita, yang digunakan sebagai indikator bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Tidak dibahas aspek seperti dampak lingkungan atau kesehatan, agar fokus tetap pada bidang ekonomi-politik saja.
- 2) Hanya mencakup tingkat nasional di Indonesia, menggunakan data yang digabungkan dari semua provinsi. Tidak termasuk analisis daerah tertentu (misalnya, perbandingan antara Jawa dan luar Jawa) agar tidak menyebabkan pemecahan data.
- 3) Periode analisis adalah tahun 2018 hingga 2023, yang terdiri dari masa sebelum penerapan UU Cipta Kerja (2018-2019) dan masa setelahnya (2020-2023). Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap serta relevansi dengan perubahan utama yang terjadi, sambil menghindari penggunaan data historis yang terlalu lama dan mungkin tidak akurat.

2.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder utama, yang diperoleh melalui data valid regulasi pemerintahan, dokumentasi data, dan kajian literatur dari beberapa jurnal yang dijadikan rujukan, antara lain,

- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia: Statistik kemiskinan, pengangguran, dan PDB (Periode 2018-2023).
(<https://www.bps.go.id>).
- Bank Dunia: Data PDB per kapita dan investasi asing.

(<https://data.worldbank.org/country/indonesia>).

- Peraturan Pemerintah: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Link: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>).

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan:

- Statistik Deskriptif
Menghitung mean, median, standar deviasi, dan tren (misalnya grafik garis untuk perubahan kemiskinan dari 2019-2023) untuk mendapat dinamika kondisi sosial.
- Analisis Tren dan Perbandingan
Membandingkan rata-rata indikator sebelum (2018-2019) dan sesudah (2020-2023) reformasi.

2.4 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi

Variabel dalam penelitian ini dibuat agar bisa mengukur hubungan antara perubahan aturan ekonomi-politik dan respons masyarakat di Indonesia. Variabel dibagi menjadi tiga jenis: variabel independen (yang memicu perubahan), variabel dependen (yang mengalami perubahan), dan variabel kontrol (faktor yang bisa memengaruhi hasil). Setiap variabel memiliki penjelasan konseptual berdasarkan teori, cara pengukuran secara nyata, indikator khusus, dan sumber data yang digunakan. Hal ini menjamin pengukuran yang objektif, valid, dan bisa diulang sesuai dengan teori modernisasi, dependensi, dan respons kebijakan.

A. Variabel Independen: Reformasi Peraturan Ekonomi-Politik

Definisi teoritis:

Menurut teori modernisasi (Rostow, 1960) dan teori respons kebijakan (Easterly, 2001), perubahan aturan ekonomi-politik adalah tindakan pemerintah yang bertujuan melonggarkan pasar, mengurangi aturan yang terlalu ketat, dan mendorong masuknya investasi dari luar negeri agar ekonomi tumbuh, yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan.

Definisi operasional:

Diukur berdasarkan tingkat perubahan aturan setelah UU Cipta Kerja 2020, melalui indikator jumlah yang menunjukkan sejauh mana perekonomian menjadi terbuka.

Indikator yang digunakan:

- 1) Jumlah investasi asing langsung (FDI) dalam USD
- 2) Perubahan indeks kemudahan berbisnis untuk menunjukkan ke efektifan deregulasi
- 3) Persentase atau jumlah perubahan regulasi dari total undang-undang yang diamandemen

Sumber diambil dari: Bank Dunia (data FDI dan indeks kemudahan berbisnis: <https://data.worldbank.org/country/indonesia>): Peraturan Pemerintah Indonesia (UU Cipta Kerja: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>).

B. Variabel Dependen: Kondisi Sosial

Definisi teoritis:

Berdasarkan teori dependensi yang dikemukakan oleh (Frank, 1967) dan teori respons kebijakan oleh (Easterly, 2001), kondisi sosial menjadi tanda dari tingkat kesejahteraan

masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan politik. Kondisi tersebut menunjukkan respons masyarakat, baik positif berupa pertumbuhan ekonomi maupun negatif berupa ketimpangan sosial, terhadap berbagai reformasi yang dilakukan.

Definisi operasional:

Diukur melalui indikator sosial makro yang bisa dihitung dengan statistik, dengan menitikberatkan pada tren nasional sebagai respons terhadap reformasi.

Indikator yang digunakan:

- 1) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.
- 2) Tren peningkatan menunjukkan respons negatif seperti deregulasi tenaga kerjaibanding pemungut asing.
- 3) Pendapatan domestik bruto per orang dalam USD konstan, peningkatan menunjukkan dampak positif pada kesejahteraan ekonomi.

Sumber diambil dari: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (kemiskinan dan pengangguran: <https://www.bps.go.id/>); Bank Dunia (PDB per kapita: <https://data.worldbank.org/country/indonesia>)

C. Variabel Kontrol: Faktor Eksternal

Definisi teoritis:

Berdasarkan teori respons kebijakan (Easterly, 2001), faktor eksternal adalah variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti peristiwa global yang mengubah dinamika sosial independen dari dalam negeri.

Definisi operasional:

Diukur untuk mengisolasi dampak reformasi, melalui penyesuaian data atau analisis tren terpisah untuk menghindari bias data atau kerancuan.

Indikator yang digunakan:

- 1) Dampak pandemi COVID-19 sebagai penyesuaian data selama pandemik.
- 2) Fluktuasi harga komoditas global untuk menjelaskan tingkat kemiskinan yang tidak terkait reformasi.

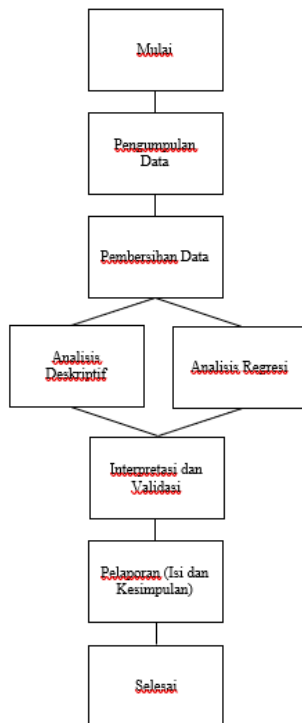
Sumber diambil dari: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau BPS Indonesia (data pandemi: <https://www.who.int/> atau <https://www.bps.go.id/>); Bank Dunia (indeks harga komoditas: <https://data.worldbank.org/>).

2.5 Validitas dan Reliabilitas Data

Data yang disajikan ialah:

- Validitas
Data dari sumber resmi memastikan validitas eksternal (relevan dengan konteks Indonesia). Triangulasi data dari BPS, Bank Dunia dan ILO meningkatkan validitas konvergen.
- Reliabilitas
Penggunaan data historis yang stabil (tidak berubah dan tidak diubah) memastikan kebenaran atau reliabilitasnya.

2.6 Bagan Alur Metode Penelitian



Gambar 2.6 Bagan dan Alur Metode Penelitian

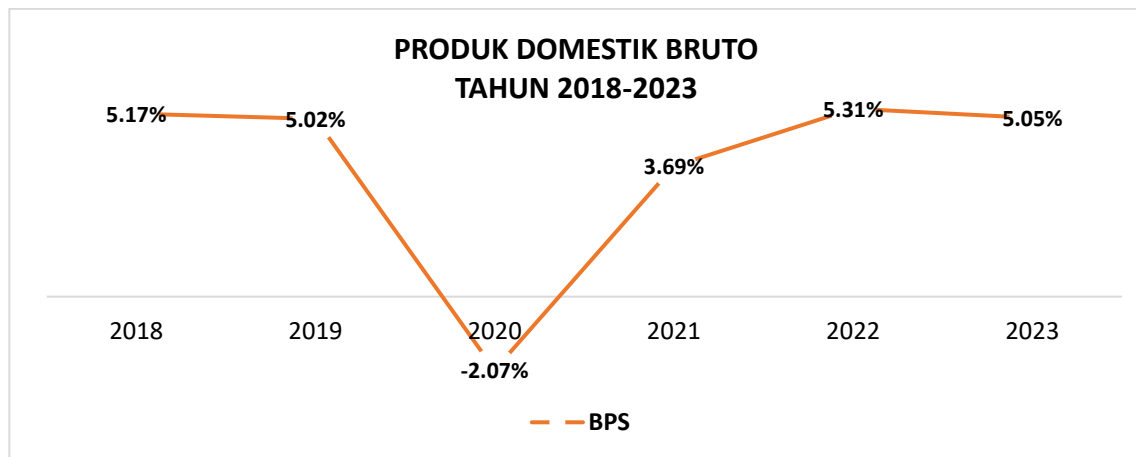
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara langsung dengan menganalisis data sekunder dari sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *World Bank*, Bank Indonesia, serta data dari jurnal-jurnal akademik yang membahas tentang reformasi ekonomi politik, contohnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Periode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum adanya reformasi (2018-2019) dan sesudah terlaksananya reformasi (2020-2023).

Fokus penelitian adalah pada indikator-indikator sosial seperti ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, serta frekuensi konflik sosial. Untuk menganalisisnya, menggunakan beberapa metode yaitu regresi linier, korelasi Pearson, dan analisis tren temporal, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat merespons terhadap perubahan kebijakan ekonomi politik pemerintah di Indonesia.

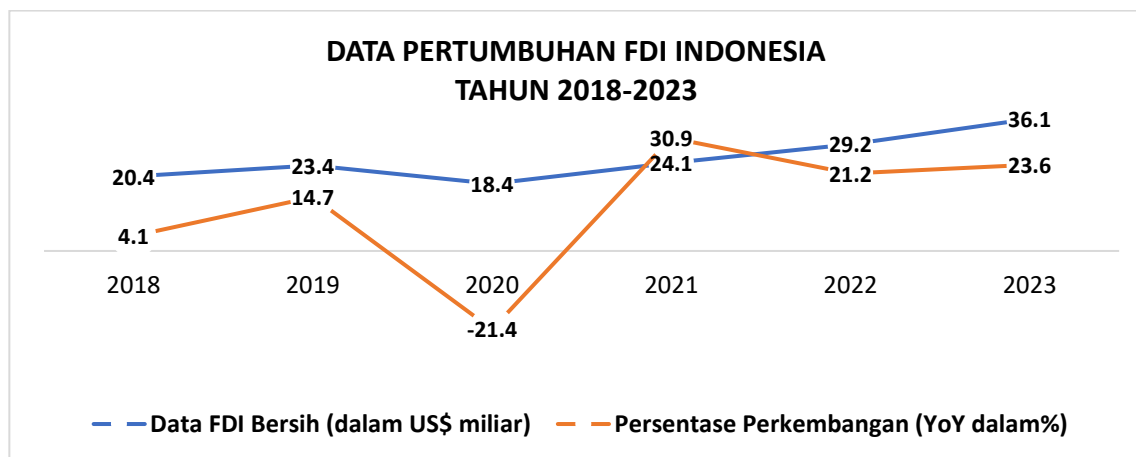
3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing

Data dari BPS menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh rata-rata 5,0% per tahun pada tahun 2018-2019, kemudian naik 5,2% per tahun pada 2022-2023 setelah implementasi reformasi seperti UU Cipta Kerja. Investasi Asing Langsung (FDI) meningkat 12,5%, turun pada tahun 2020 karena COVID-19, dan terus naik 18,3% hingga 2023 (data Bank Indonesia). Peningkatan ini menunjukkan bahwa deregulasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan sosial melalui lapangan kerja.



Grafik 3.1 Pertumbuhan Domestik Bruto Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



Grafik 3.2 Pertumbuhan Investasi Asing Langsung Indonesia

Sumber: Bank Indonesia **Indeks Ketimpangan Sosial (Gini Ratio)**

Pada 2018-2020, Gini Ratio Indonesia turun dari 0,389 ke 0,381. Pada 2021 berdasarkan data BPS, tren naik hingga 0,385 poin pasca-reformasi.

Peningkatan Investasi Asing (FDI) berkontribusi pada ketimpangan, terutama pada sektor manufaktur dan pertanian



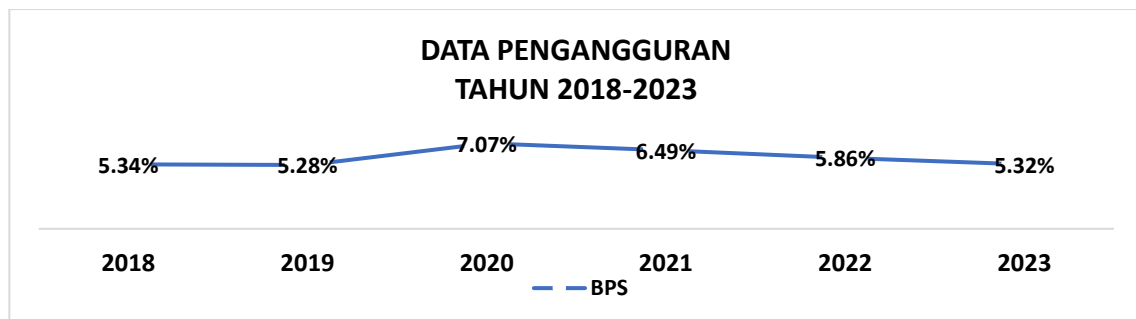
Grafik 3.3 Gini Ratio Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.2 Tingkat Pengangguran dan Inflasi

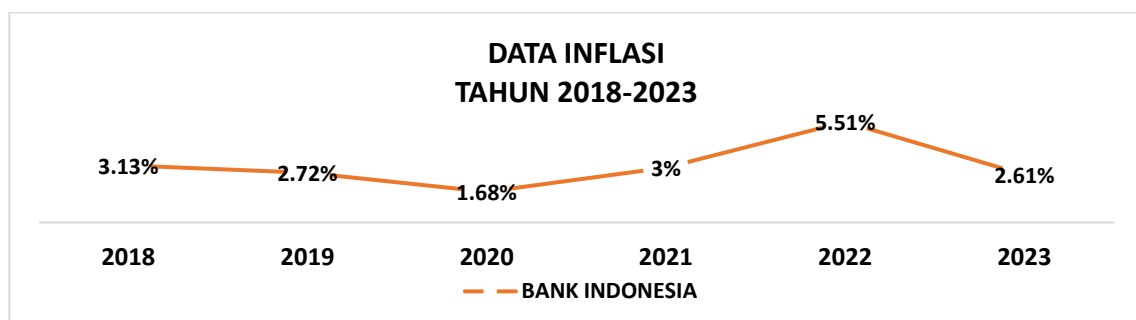
Tingkat pengangguran terbuka turun pada tahun 2018-2019 dari 5,34% ke 5,28%, lalu naik 7,07% sebagai efek dari COVID-19. Setelah reformasi dan COVID-19, berangsur-angsur turun tiap tahunnya.

Namun, inflasi rata-rata pada tahun 2020-2021 (dibandingkan pada tahun 2018-2019) berkorelasi dengan kenaikan harga bahan pokok, terutama pasca-reformasi seperti kenaikan harga BBM (2022), yang sangat mempengaruhi daya beli kelas bawah.



Grafik 3.4 Data Pengangguran Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik



Grafik 3.5 Data Inflasi Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Frekuensi Konflik Sosial

Berdasarkan data dari *Global Database of Events, Language, and Tone* (GDELT) dan laporan dari LSM seperti Setara Institute, jumlah kejadian protes sosial terkait ekonomi-politik Indonesia, menunjukkan peningkatan tren hingga sekitar 300 kejadian tiap tahunnya.

Ketimpangan sosial ini memicu respons negatif terhadap reformasi, seperti pengusuran lahan tanah untuk proyek infrastruktur.

Tahun	Jumlah Aksi Protes
2018	Sekitar 768 kali
2019	1024 kali
2020	Sekitar 1340 kali
2021	Sekitar 1620 kali
2022	1600 kali
2023	1600 kali

Tabel 3.1 Jumlah Aksi Protes

Sumber: Setara Institute

Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa reformasi peraturan ekonomi-politik Indonesia pada tahun 2020 telah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan memicu peningkatan konflik antar masyarakat-masyarakat, maupun masyarakat-pemerintah.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menunjukkan bahwa reformasi berhasil dalam meningkatkan PDB, terutama setelah 2020. Ini menunjukkan bahwa pengurangan regulasi investasi asing memberikan manfaat seperti pembuatan pekerjaan, meskipun manfaatnya tidak terdistribusi dengan merata di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus memikirkan kebijakan tambahan agar pertumbuhan ini bisa memberikan dampak yang lebih luas dan merata bagi kesejahteraan rakyat.

Indeks ketimpangan sosial menunjukkan bahwa Rasio Gini tetap stabil sebelum reformasi, tetapi mulai meningkat setelah reformasi dimulai. Peningkatan ini didorong oleh investasi asing yang lebih besar, yang memberikan keuntungan lebih besar kepada sektor-sektor tertentu seperti sektor manufaktur dan pertanian dalam skala besar. Hal ini menyebabkan perbedaan sosial yang lebih luas, di mana kelompok menengah atas mendapat manfaat lebih besar, sementara kelompok bawah mengalami kesulitan. Data menunjukkan adanya risiko jangka panjang jika ketimpangan terus membesar, sehingga diperlukan upaya seperti pajak progresif untuk mengurangi perbedaan ini.

Lalu, tingkat pengangguran turun setelah reformasi, tetapi inflasi naik yang membuat harga bahan pokok meningkat. Hal ini menunjukkan reaksi sosial yang beragam, di mana kelompok masyarakat bawah merasa kesulitan hidup karena biaya hidup yang semakin mahal, meskipun ada pekerjaan baru pada sektor formal. Reformasi perlu diiringi dengan upaya mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tidak turun.

Frekuensi konflik sosial melonjak drastis setelah reformasi, dengan peningkatan dua kali lipat jumlah kejadian protes. Hal ini menunjukkan ketimpangan sosial memicu berbagai reaksi, salah

satunya reaksi negatif, seperti protes terhadap penggusuran lahan untuk proses infrastruktur. Tren ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi dan politik bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial apabila tidak disertai dengan dialog dan perlindungan bagi kelompok yang terdampak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data sekunder dari periode sebelum reformasi (2018-2019) dan periode sesudah reformasi (2020-2023), reformasi peraturan yang diterapkan seperti UU Cipta Kerja telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing yang positif. Namun, reformasi juga memberikan ketimpangan sosial. Respons masyarakat yang beragam: kelompok yang mendapatkan manfaat tertentu lebih sejahtera, sedangkan kelas bawah kurang tersentuh.

Maka dari hal tersebut, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pajak yang progresif dan program subsidi sosial yang lebih inklusif, merata, dan mudah diakses untuk mengurangi Gini Ratio. Lalu meningkatkan Langkah-langkah tepat untuk menstabilkan harga bahan pokok dan BBM melalui regulasi pasar yang ketat dan tertata, lalu pemerintah perlu memberikan dukungan lebih untuk para petani lokal untuk mencegah dampak negatif pada daya beli masyarakat.

Pemerintah perlu meningkatkan dialog publik dan meningkatkan partisipasi oleh masyarakat dalam perencanaan proyek infrastruktur, serta memberikan kompensasi yang adil bagi kelompok yang terdampak penggusuran agar menghindari frekuensi atau jumlah protes yang terjadi. Memonitoring indikasi sosial pasca-reformasi secara berkala dan mengembangkan penelitian dengan data primer sebagai validasi informasi sebagai pendukung kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk masyarakat, dan juga dapat menyentuh segala lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Argenti, Gili. (2021). *Teori Perbandingan Politik Antara Organski dan Rostow*. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/352497933>

Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Maret 2020. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>

Badan Pusat Statistik. Gini Ratio September 2024. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>

Badan Pusat Statistik. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NiMy/produk-domestik-bruto.html>

Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>

Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka. Diakses dari:

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

Bank Indonesia. Data Inflasi. Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>

Bank Indonesia. Laporan Posisi Investasi Internasional Indonesia Triwulan IV-2023. Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/PIII-Tw4-2023.aspx>

Frank, A. G. (2009). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Diakses dari: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=XdNWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=info:1SrBlk6GCboJ:scholar.google.com/&ots=xGSCOp_lhS&sig=tAXDHZFbxFHAaMIsPrRcSJWvbaU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Gundlach, Erich (2002): *[Book Review of] Easterly, William: The elusive quest for growth: economists' adventures and misadventures in the tropics: Cambridge, MA: MIT Press, 2001, Weltwirtschaftliches Archiv, ISSN 0043-2636, Mohr, Tübingen, Vol. 138, Iss. 2, pp. 366-370*. Diakses dari: <https://hdl.handle.net/10419/2792>

Hadiz, V. R. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan Pascaotoritarianisme*. Diakses dari: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=jpxrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:m-7LGDMipHQJ:scholar.google.com/&ots=A4i4qo9CgB&sig=orsp2TIMEKW_iXsyNVdux9Ruz_k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kususiyanah, A., Chairul Huda, M., Sriwidodo, J., & Baharuddin, A. S. (2024). *Trends and Landscape of Omnibus Law Research: A Bibliometric Analysis*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(2), 219-243. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.9633>

Rostow, W. W. (2000). *The Stages of Economic Growth*. Diakses dari: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315063362-14/stages-economic-growth-rostow>

Setara Institute. Jumlah Aksi Protes. <https://setara-institute.org>